

# RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**DINAS SOSIAL,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAGELANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Renstra ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra ini memuat perencanaan selama periode renstra yang pada tataran pelaksanaan.

Dalam penyusunan Renstra ini telah melewati tahapan pengkajian dan verifikasi dari Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, serta telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Magelang. Tentunya dokumen ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyempurnaan pada masa yang akan datang. Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah tersusun ini diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025-2029.

Kota Mungkid, 19 September 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA  
KABUPATEN MAGELANG



BELA PINARSI, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670120 198703 2 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	I - 1
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I - 6
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> .....	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinsos PPKB PPPA .....	II - 1
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	II - 1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II - 11
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinsos PPKB PPPA .....	II - 18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	II - 40
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinsos PPKB PPPA .....	II - 42
2.2.1. Telaah Rencana Strategis Kementerian Terkait dan Perangkat Daerah Provinsi Terkait .....	II - 43
2.2.2. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinsos PPKB PPPA .....	II - 46
<b>BAB III</b>	
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025- 2029 .....	III - 1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 .....	III - 7
<b>BAB IV</b>	
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinsos PPKB PPPA .....	IV - 1
4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV - 38
4.3 Indikator Kinerja Dinsos PPKB PPPA .....	IV - 45
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	V - 1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	ASN Dinsos PPKB PPPA Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 .....	II - 12
Tabel 2.2	ASN Dinsos PPKB PPPA Berdasarkan Golongan Tahun 2025 .....	II - 12
Tabel 2.3	Rekapitulasi Tanah dan Bangunan Milik Dinsos PPKB PPPA .....	II - 13
Tabel 2.4	Rekapitulasi Kendaraan Milik Dinsos PPKB PPPA ...	II - 16
Tabel 2.5	Rekapitulasi Peralatan Milik Dinsos PPKB PPPA ....	II - 16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024 .....	II - 19
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 .....	II - 26
Tabel 2.8	Isu Strategis Dinsos PPKB PPPA .....	II - 48
Tabel 3.3	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 .....	III - 6
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 .....	III - 8
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 .....	III - 9
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	IV - 2
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	IV - 18
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV - 39
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama .....	IV - 46
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci .....	IV - 47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah .....	I - 2
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	III - 4
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah .....	III - 4
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	IV - 1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional maupun provinsi untuk periode 5 (lima) tahun. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasarannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dokumen Renstra ini disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Rencana strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Hal tersebut itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas / kegiatan selama kurun waktu empat tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

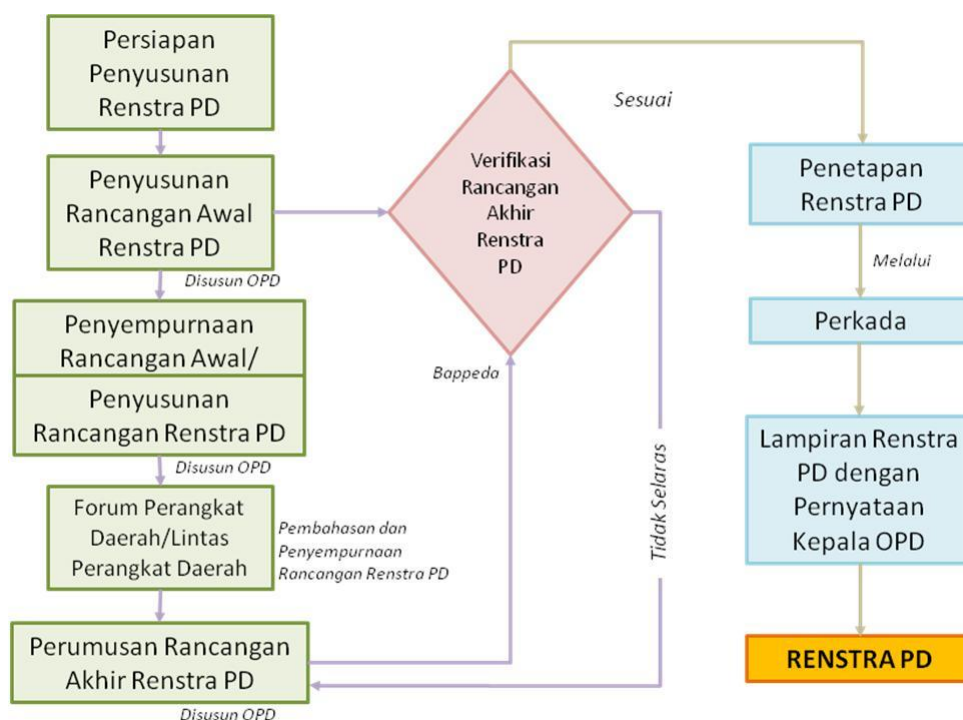
Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang. Renstra Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang disusun juga dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Renstra Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama adalah analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, selanjutnya melakukan analisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja Perangkat Daerah agar Renstra yang disusun sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah dari pendirian organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. Dengan mengilhami hal tersebut, maka pada setiap organisasi publik harus memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar target yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan Renstra Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum dilaksanakannya Penyusunan Renstra Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah Dinsos PPKB PPPA dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2025-2029.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
7. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinsos PPKB PPPA.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bab ini berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah termasuk capaian SPM, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, serta Penentuan isu-isu Strategis Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif, uraian Sub Kegiatan secara terperinci, uraian Sub Kegiatan Prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, serta Indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan bahwa dokumen Renstra merupakan kaidah dan pedoman bagi pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPKB PPPA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian disingkat Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Kedudukan Dinsos PPKB PPPA merupakan unsur pendukung Kepala Daerah (Bupati), yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan fungsi memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya.

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok Dinsos PPKB PPPA adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah spesifik di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 tahun 2016 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

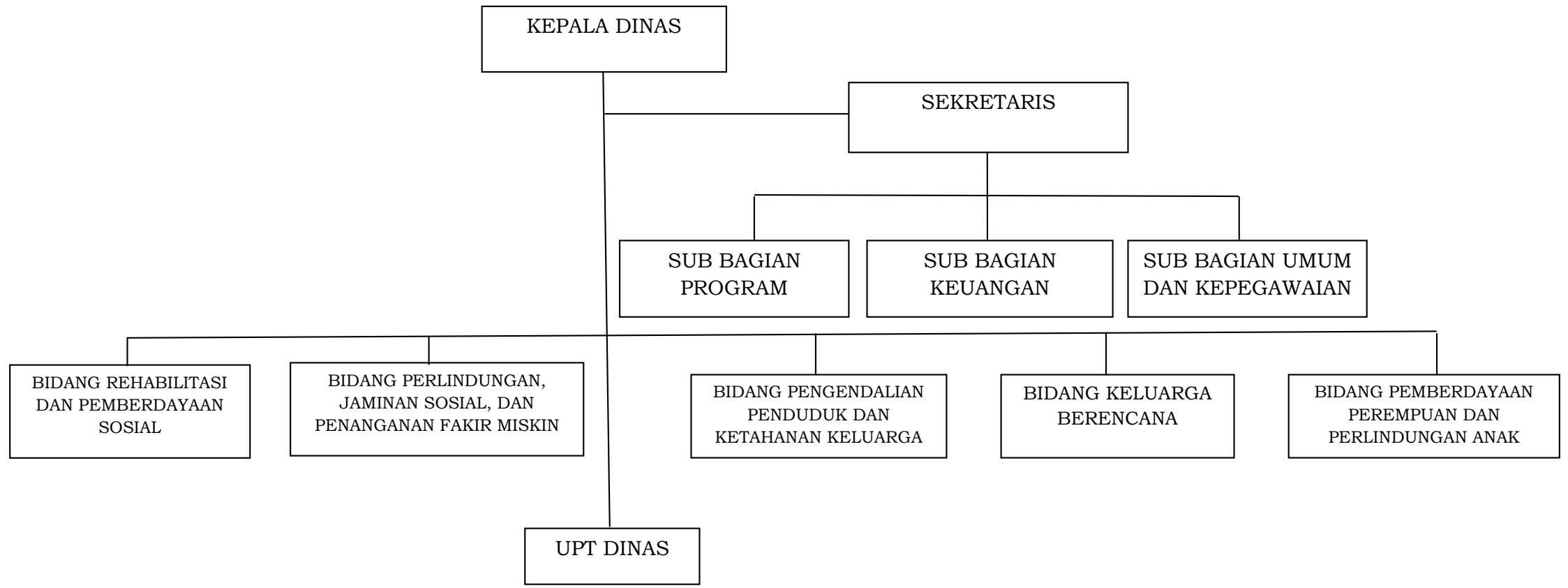
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinsos PPKB PPPA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga
- f. Bidang Keluarga Berencana
- g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- h. UPT
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG**



Adapun tugas dan fungsi dalam struktur organisasi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2023 sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a) Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b) Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesekretariatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- 7) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIAT

### a) Tugas

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### b) Fungsi

- 1) Pengoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Pengoordinasian perumusan konsep kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan UPT pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Pelaksanaan pelayanan umum bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 6) Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- 7) Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- 8) Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
- 9) Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- 10) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik Daerah (barang/jasa);
- 11) Pengekoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 12) Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- 13) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- 14) Fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- 16) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
- 17) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

#### a) Tugas

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b) Fungsi

- 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- 2) Perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- 3) Pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- 6) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL, DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

a) Tugas

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan sosial, penanganan fakir miskin dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b) Fungsi

- 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;

- 2) Perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) Pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 6) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 7) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KETAHANAN KELUARGA

### a) Tugas

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### b) Fungsi

- 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga;
- 2) Perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga;

- 3) Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, informasi keluarga, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, informasi keluarga, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga;
- 7) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga;
- 8) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. BIDANG KELUARGA BERENCANA

### a) Tugas

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang jaminan pelayanan keluarga berencana, advokasi, penggerakan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### b) Fungsi

- 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang keluarga berencana;
- 2) Perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana,

advokasi, penggerakan, dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana;

- 3) Pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana, advokasi, penggerakan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana, advokasi, penggerakan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang jaminan pelayanan keluarga berencana, advokasi, penggerakan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana, advokasi, penggerakan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana;
- 7) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana, advokasi, penggerakan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana;
- 8) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang keluarga berencana;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 7. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### a) Tugas

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b) Fungsi

- 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
- 2) Perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan,, dan pemenuhan hak anak;
- 7) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan perempuan,, dan pemenuhan hak anak;
- 8) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 10) Pelaksanan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berdasarkan data Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, pada tahun 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 37 orang. Secara detail dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**ASN Dinsos PPKB PPPA Berdasarkan Pendidikan**  
**Tahun 2025**

No	Jenis Pendidikan	JUMLAH	Laki-Laki	Perempuan
1	Strata 2 (S2)	6	2	4
2	Strata 1 (S1)	21	7	14
3	DIV	3	2	1
4	Sarjana Muda (D3)	2	2	-
5	SLTA	4	2	2
6	SLTP	1	1	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>21</b>

*Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah ASN Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, berjumlah 37 orang yang terdiri dari 21 perempuan dan 16 laki-laki, dengan formasi terbanyak berpendidikan S1 yaitu berjumlah 21 orang dengan 7 laki-laki dan 14 perempuan dan formasi paling sedikit tingkat pendidikannya adalah SLTP sebanyak 1 (satu) orang dengan jenis kelamin laki-laki.

**Tabel 2.2**  
**ASN Dinsos PPKB PPPA Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

NO	GOLONGAN	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Golongan IV	8	3	5
2	Golongan III	24	8	16
3	Golongan II	4	4	-
4	Golongan I	-	-	-
5	PPPK Golongan IX	1	1	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>21</b>

*Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025*

Sesuai dengan Tabel 2.2 sebagian besar merupakan golongan III, yaitu sebanyak 24 orang, yang terdiri dari 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan.

Selain dukungan sumber daya manusia, dukungan Sarana dan Prasarana juga memegang peranan yang sangat penting bagi berjalannya aktifitas pekerjaan dan pelayanan sosial, sehingga keberadaan fasilitas kantor dan aset menjadi salah satu kunci bagi kelancaran berjalannya kegiatan.

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Tanah dan Bangunan**  
**Milik Dinsos PPKB PPPA**

NO.	Nama Aset	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
<b>A.</b>	<b>Tanah</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>3978</b>
<b>B.</b>	<b>Gedung</b>					
1	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
2	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
3	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
4	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN	Unit		1		1
5	BANGUNAN GEDUNG.MESS/WISMA/BUNG ALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN DARURAT	Unit	1			1
6	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Unit		1		1
7	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	Unit		1		1
8	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	Unit		1		1
9	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE E PERMANEN	Unit		1		1
10	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN KLINIK/PUSKESMAS	Unit	1			1
11	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Unit	1			1
12	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
13	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Unit	1			1
14	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
15	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
16	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1

NO.	Nama Aset	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
17	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
18	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
19	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
20	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
21	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
22	BANGUNAN GEDUNG.SARANA PELENGKAP PERMANEN	Unit	1			1
23	BANGUNAN GEDUNG.SARANA PELENGKAP PERMANEN	Unit	1			1
24	BANGUNAN GEDUNG.SARANA PELENGKAP PERMANEN	Unit	1			1
25	BANGUNAN GEDUNG.SARANA PELENGKAP PERMANEN	Unit	1			1
26	BANGUNAN GEDUNG.SARANA PELENGKAP PERMANEN1	Unit	1			1
27	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
28	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
29	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
30	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
31	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
32	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
33	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
34	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
35	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1

NO.	Nama Aset	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
36	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
37	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	1			1
38	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN	Unit		1		1
39	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN	Unit		1		1
40	Bangunan Gedung Balai KB & KS Salaman	Unit		1		1
41	Bangunan Gedung Balai KB & KS Salaman (Toilet)	Unit		1		1
42	Bangunan Gedung Balai KB & KS Kaliangkrik	Unit		1		1
43	Bangunan Gedung Balai KB & KS Candimulyo	Unit	1			1
44	Bangunan Gedung Balai KB & KS Salam	Unit		1		1
45	Bangunan Gedung Balai KB & KS Ngablak	Unit		1		1
46	Bangunan Gedung Balai KB & KS Grabag	Unit		1		1
47	Bangunan Gedung Balai KB & KS Tempuran	Unit		1		1
48	Bangunan Gedung Balai KB & KS Windusari	Unit		1		1
49	Bangunan Gedung Balai KB & KS Secang	Unit		1		1
50	Bangunan Gedung Balai KB & KS Borobudur	Unit		1		1
51	Bangunan Gedung Balai KB & KS Muntilan	Unit	1			1
52	Bangunan Gedung Balai KB & KS Tegalrejo	Unit	1			1
53	Bangunan Gedung Balai KB & KS Ngluwar	Unit	1			1
54	Bangunan Gedung Balai KB & KS Kajoran	Unit		1		1
55	Bangunan Gedung Balai KB & KS Pakis	Unit		1		1
56	Bangunan Gedung Balai KB & KS Mungkid	Unit	1			1

NO.	Nama Aset	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
57	Bangunan Gedung Balai KB & KS Bandongan	Unit		1		1
58	Bangunan Gedung Balai KB & KS Mertoyudan	Unit	1			1
59	Bangunan Gedung Balai KB & KS Dukun	Unit	1			1
60	Bangunan Gedung Balai KB & KS Srumbung	Unit	1			1

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang memiliki aset tanah seluas 3.978 m<sup>2</sup> dan gedung Balai Penyuluhan KB sebanyak 21 unit yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang. Rata-rata memiliki kondisi baik dan sedang, dan belum ada bangunan yang dalam kondisi rusak.

**Tabel 2.4**

**Rekapitulasi Kendaraan Milik Dinsos PPKB PPPA**

NO.	NAMA ASET	JUMLAH	Kondisi
1	Mobil Dinas	5 Unit	Baik
2	Mobil Operasional	3 Unit	Baik
3	Mobil pick up double cabin Unit Penerangan KB (Mupen)	1 Unit	Baik
4	Mobil Bus Unit Pelayanan KB (Muyan)	1 Unit	Baik
5	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin)	1 Unit	Baik
6	Mobil Bok Dropping Alokon KB	1 Unit	Baik
7	Sepeda Motor Dinas	126 Unit	Baik

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025

Pada tabel 2.4 menunjukkan bahwa kendaraan yang dimiliki oleh Dinsos PPKB PPPA semua masih dalam kondisi yang baik.

**Tabel 2.5**

**Rekapitulasi Peralatan Milik Dinsos PPKB PPPA**

NO.	NAMA ASET	JUMLAH	Kondisi
<b>A.</b>	<b>Alat Kedokteran</b>		
1	Obgyn Bed	2 Unit	Rusak Berat
2	Tensi Digital	1 Unit	Baik
3	Thermogan	1 Unit	Baik
4	Kursi Roda	2 Unit	Baik
5	Walker Lipat	1 Unit	Baik

<b>NO.</b>	<b>NAMA ASET</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Kondisi</b>
6	Kruk Ketiak	1 Unit	Baik
7	Tongkat Kaki Tiga	1 Unit	Baik
8	Kruk Siku	1 Unit	Baik
<b>B.</b>	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>		
1	Handphone	61 Unit	Baik
2	Pesawat Telepon	1 Buah	Baik
3	Faximile	1 Unit	Baik
4	Camera	105 Buah	4 Rusak Berat, 101 Baik
5	LCD Proyektor	39 Buah	3 Rusak Berat, 36 Baik
6	Handycam	1 Buah	Rusak Berat
7	Tripod & Screen Proyektor	1 Buah	Baik
8	UPS	3 Buah	3 Rusak Berat,
9	Microphon	3 Buah	1 Rusak Berat, 2 Baik
10	Wireless	23 Buah	20 Rusak Berat, 3 Baik
<b>C.</b>	<b>Alat Kantor</b>		
1	Mesin Ketik Manual	2 Buah	Rusak Berat
2	Personal Computer	37 Unit	7 Baik, 30 Rusak Berat
3	Note Book/Laptop	72 Buah	39 baik, 33 rusak berat
4	LCD	39 Buah	36 Baik, 3 Rusak Berat
5	Microphone	3 Buah	2 Baik, 1 Rusak berat
6	Printer	42 Buah	18 Baik, 24 Rusak Berat
<b>D.</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>		
1	Lemari Besi	59 Buah	55 Baik , 4 Rusak berat
2	Almari Kayu	67 Buah	61 Baik , 6 Rusak berat
3	Rak	20 Buah	16 Baik, 4 Rusak berat
5	Filing Kabinet	7 Buah	5 Baik, 2 rusak berat
6	Brankas Tanam	1 Buah	Baik
7	Peti Uang	1 Buah	Baik
8	Meja Meeting	16 Buah	10 Baik, 6 Rusak Berat
9	Meja tulis	20 Buah	14 Baik, 6 rusak berat
10	Meja Telepon	2 Buah	Baik
11	Meja bundar	1 Buah	Baik
12	Meja Komputer	5 Buah	1 Baik, 4 Rusak Berat
13	Meja ketik	2 Buah	Baik
14	Meja Kerja	73 Buah	Baik
15	Kursi Kerja	83 Buah	Baik
16	Kursi besi	3 Buah	Baik
17	Kursi tangan	10 Buah	Baik
18	Kursi rapat	134 Buah	Baik
19	Kursi Putar	23 Buah	Baik
20	Kursi Lipat	20 Buah	Baik
21	Kursi Kerja Pejabat	4 Buah	Baik
22	Kursi Kerja putar	9 Buah	Baik
23	Kaca Bening	10 Buah	Baik

<b>NO.</b>	<b>NAMA ASET</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Kondisi</b>
24	AC	11 Buah	6 Baik, 5 Rusak berat
25	Kipas Angin	48 Buah	36 Baik, 12 Rusak Berat
26	Gordyn	165 M	Baik
27	Rel Gorden	125 M	Baik
28	Teralis Jendela	40 M	Baik
29	Teralis Pintu	5 M	Baik
30	Jam Dinding	5 Buah	Baik
31	Dispenser	7 Buah	6 Baik, 1 Rusak Berat
32	Exhaust Fan	18 Buah	Baik
33	Troly barang dorong	1 Buah	Baik
34	Manual/Hand Jack Palet	1 Buah	Baik
35	Vacum Cleaner Panasonic	1 Buah	Baik
36	Plastik terpal transparant uk. 5x5 m2	4 Buah	Baik
37	Fire extinguisher 25 kg whel carrying	1 Buah	Baik
38	Tangga Aluminium fortuna, 2m	1 Buah	Rusak Berat
39	Meja kursi tamu(ZICE)	13 Set	Baik
40	White board	22 Buah	14 Baik, 8 Rusak Berat
41	Papan nama	19 Buah	8 Baik, 11 Rusak Berat

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinsos PPKB PPPA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2020 sampai 2024 telah melakukan beberapa program dan kegiatan, adapun hasil kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Persentase penurunan PMKS				0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,63	0,62	0,57	0,58	1,15	100	100	98,28	100	100
I	Cakupan penanganan PMKS				47,46	48,04	48,63	49,21	49,8	104,52	86,22	88,54	88,89	85,89	100	100	100	100	100
B	Angka Harapan Hidup				73,39	73,47	73,52	73,56	73,61	73,72	73,88	74,03	74,2	74,68	100	100	100	100	100
I	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				0,73	0,71	0,93	0,91	0,89	0,93	0,93	0,91	0,91	0,85	72,6	69,01	100	100	100
II	Persentase Keluarga Pra Sejahtera				20,15	19,61	19,07	18,53	18	20,15	13,80	12,41	8,63	4,18	100	100	100	100	100
C	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				69,33	69,75	69,93	70,23	70,53	69,65	69,64	69,66	70,52	66,97	100	99,84	99,61	100	94,95
D	Kabupaten Layak Anak				Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100	100	100	100	100
I	Cakupan Pemberdayaan Perempuan				66,46	66,69	NA	NA	NA	66,45	67,54	NA	NA	20,35	99,98	100	NA	NA	NA
II	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Gender				NA	NA	22,59	23,46	24,34	NA	NA	20,54	23,46	20,35	NA	NA	90,93	100	83,61
III	Rasio Kekerasan				0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,009	0,009	0,029	0,018	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)				8,96	9	10,10	10,10	10,10	8,75	8,96	10,10	18,77	16,94	97,66	100	100	100	100
4	Persentase fakir miskin yang diberdayakan				0,1	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
5	Persentase penyandang disabilitas serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				2,57	NA	NA	NA	NA	6,97	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA
6	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **				100	100	100	100	100	82	100	100	100	100	82	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				33,95	33,95	0,04	0,05	0,05	104,52	37,36	0,05	0,17	0,05	100	100	100	100	100
8	Persentase Fakir miskin yang tervalidasi				100	100	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA
9	Persentase fakir miskin yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan social				NA	NA	87,18	72,38	57,59	NA	NA	88,54	71,25	95	NA	NA	100	100	100
10	Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				45,25	NA	NA	NA	NA	105	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA
11	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**				NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Persentase PSKS yang Terlibat Dalam Penanganan Korban Bencana				NA	NA	6,47	7,29	8,22	NA	NA	6,47	20,72	20,72	NA	NA	100	100	100
13	Persentase lembaga yang melaksanakan PUG				NA	NA	4,76	5,24	5,7	NA	NA	4,70	5,24	5,75	NA	NA	98,74	100	100
14	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya				44,27	45,13	14,46	14,52	14,62	42,83	45,13	14,00	14,46	37,34	96,75	100	96,82	99,59	100
15	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar				57	71	NA	NA	NA	20,32	98	NA	NA	NA	35,65	100	NA	NA	NA
16	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar				100	NA	NA	NA	NA	85,22	NA	NA	NA	NA	85,22	NA	NA	NA	NA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar				NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	NA	100	NA	100	100	100
18	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart				66,66	100	100	100	100	66,66	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar				NA	71	NA	NA	NA	NA	98	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA
20	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart				NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
21	Usia Kawin Pertama (UKP)				21	21,3	21,5	21,8	22	25	21	22,6	22,7	22,4	100	100	100	100	100
22	Persentase pembangunan ketahanan keluarga				54,09	NA	NA	NA	NA	25,64	NA	NA	NA	NA	47,40	NA	NA	NA	NA
23	Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera				55,06	NA	NA	NA	NA	53,83	NA	NA	NA	NA	97,77	NA	NA	NA	NA
24	Persentase peningkatan partisipasi ber-KB				2,41	NA	NA	NA	NA	-1,96	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat				90,84	NA	NA	NA	NA	90,80	NA	NA	NA	NA	99,96	NA	NA	NA	NA
26	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)				12,4	11,92	13,51	12,98	12,42	12,35	18,3	13,17	11,71	10,75	99,60	46,47	98,59	100	100
27	Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)*				74,7	75,50	70,30	71,20	72,1	74,9	64,68	68,43	71,85	74,21	100	85,67	97,34	100	100
28	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)				34,8	NA	NA	NA	NA	35	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA
29	Persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB				39,6	NA	16,66	29,83	25	39,6	NA	16	60	85,71	100	NA	96,04	100	100
30	Cakupan pembangunan ketahanan keluarga				NA	NA	58,50	60,32	62,29	NA	NA	58,5	72,68	62	NA	NA	100	100	99,53

Berdasarkan Tabel 2.6 dengan penyajian data membandingkan target dengan realisasi capaian kinerja, dapat diketahui bahwa Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, 5 (lima) indikator sasaran dan 30 indikator kinerja program. Pada indikator kinerja program dalam rentang 2020 sampai dengan 2024 terdapat beberapa indikator yang berubah seiring dengan penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terdapat penyajian data yang kosong akibat adanya perubahan indikator kinerja program pada tahun selanjutnya.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dalam capaian indikator sasaran perangkat daerah, sampai dengan akhir tahun kinerja Dinsos PPKB PPPA secara umum dapat mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat kenaikan pencapaian kinerja, hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya yang dilakukan Dinsos PPKB PPPA bersama mitra kerja dan jejaringnya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Namun demikian terdapat beberapa indikator sasaran yang pada akhir tahun kinerja tidak dapat tercapai, salah satunya adalah Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Gender, hal ini dikarenakan jumlah perempuan yang duduk dalam legislatif mengalami penurunan.

Selain data capaian tersebut, terdapat capaian indikator yang masuk sebagai Indikator Kinerja Kunci Dinsos PPKB PPPA, namun tidak masuk menjadi indikator tujuan, sasaran, maupun program. Adapun indikator tersebut yaitu:

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).
3. TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total).

Pada capaian 2024, persentase ARG pada belanja langsung APBD adalah sebesar 25,46%, sedangkan pada capaian tahun 2023 adalah sebesar 59,25, atau mengalami penurunan sebesar 33,79%. Untuk indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2023 tercapai 9,3 dan pada tahun 2024 tercapai 8,8. Artinya bahwa terjadi penurunan 0,5 per 100.000 penduduk perempuan. Pada indikator capaian TFR, hal ini juga mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana pada tahun 2023 TFR Kabupaten Magelang tercapai 2,06 sedangkan pada tahun 2024 tercapai 2,03.

**Tabel 2.7**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		-													
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	37.972.895	NA	NA	NA	NA	37.972.645	NA	NA	NA	NA	99,99	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8.935.165	NA	NA	NA	NA	8.935.085	NA	NA	NA	NA	99,99	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	11.808.685	NA	NA	NA	NA	11.538.320	NA	NA	NA	NA	97,71	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah</i>	6.987.255	NA	NA	NA	NA	6.959.755	NA	NA	NA	NA	99,61	NA	NA	NA	NA
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		-													
<i>Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka</i>	24.958.875	NA	NA	NA	NA	24.956.510	NA	NA	NA	NA	99,99	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah</i>	95.899.840	NA	NA	NA	NA	95.613.595	NA	NA	NA	NA	99,70	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya</i>	96.530.000	NA	NA	NA	NA	79.800.000	NA	NA	NA	NA	82,67	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya</i>	340.530.870	NA	NA	NA	NA	301.076.708	NA	NA	NA	NA	88,41	NA	NA	NA	NA

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	527.554.850	NA	NA	NA	NA	339.311.161	NA	NA	NA	NA	64,32	NA	NA	NA	NA
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	-	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	106.674.575	NA	NA	NA	NA	104.842.856	NA	NA	NA	NA	98,28	NA	NA	NA	NA
<b>Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>		-													
Kegiatan Rehabilitasi Sosial	399.720.760	NA	NA	NA	NA	395.934.079	NA	NA	NA	NA	99,05	NA	NA	NA	NA
Kegiatan Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah	83.900.000	NA	NA	NA	NA	62.819.240	NA	NA	NA	NA	74,87	NA	NA	NA	NA
Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	310.220.000	NA	NA	NA	NA	309.586.362	NA	NA	NA	NA	99,80	NA	NA	NA	NA
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		-													
Kegiatan Penanganan Fakir Miskin	5.219.325	NA	NA	NA	NA	5.219.325	NA	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
Kegiatan Pemberdayaan Sosial	323.414.000	NA	NA	NA	NA	295.448.720	NA	NA	NA	NA	91,35	NA	NA	NA	NA
Kegiatan Fasilitasi Komda Lansia	35.592.500	NA	NA	NA	NA	20.839.130	NA	NA	NA	NA	58,55	NA	NA	NA	NA
Kegiatan Optimalisasi Data Kemiskinan	592.632.985	NA	NA	NA	NA	590.380.015	NA	NA	NA	NA	99,62	NA	NA	NA	NA
Kegiatan Fasilitasi Program Bantuan Sosial Pangan	293.656.710	NA	NA	NA	NA	289.570.575	NA	NA	NA	NA	98,61	NA	NA	NA	NA
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>															
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	6.487.500	7.500.000	7.500.000	6.790.182	NA	6.479.910	7.499.990	7.499.290	6.513.700	NA	99,88	99,99	99,99	95,93
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	5.710.190	8.000.000	8.000.000	5.946.355	NA	5.709.990	7.949.925	7.881.880	5.766.300	NA	99,99	99,37	98,52	96,97
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA-	30.000.000	NA	NA	NA	NA	28.335.000	NA	NA	NA	NA	94,45	NA	NA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	39.792.280	122.288.065	80.000.000	118.875.184	NA	39.767.610	121.771.845	79.883.619	118.565.072	NA	99,94	99,58	99,85	99,74
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	30.498.942	30.498.942	30.498.560	46.029.945	NA	30.492.585	30.330.955	30.327.946	43.604.720	NA	99,98	99,45	99,44	94,73
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	40.260.000	46.639.984	52.600.000	99.999.996	NA	35.323.355	38.591.639	44.835.398	54.402.490	NA	87,74	82,74	85,24	54,40
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Mebel	NA	NA	44.380.000	NA	75.000.000	NA	NA	31.232.000	NA	74.900.000	NA	NA	70,37	NA	99,87
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	515.269.053	42.000.000	175.000.000	NA	NA	493.849.500	39.800.000	169.300.000	NA	NA	95,84	94,76	96,74
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	102.380.000	NA	NA	NA	NA	98.053.380	NA	NA	NA	NA	95,77	NA	NA
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	262.009.968	277.733.968	NA	493.890.000	NA	213.199.200	235.484.060	NA	388.519.456	NA	81,37	84,79	NA	78,67

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	20.000.000	20.000.000	20.000.000	25.150.000	NA	19.935.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	NA	99,68	100,00	100,00	99,40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	211.697.000	322.489.424	267.173.840	369.897.413	NA	197.428.892	309.535.794	252.739.935	346.748.065	NA	93,26	95,98	94,60	93,74
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	NA	4.691.101.105	4.947.847.764	4.382.932.214	5.877.541.527	NA	4.389.927.342	4.465.674.407	4.265.239.146	5.704.642.146	NA	93,58	90,25	97,31	97,06
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	32.000.000	43.513.960	56.325.000	61.100.000	NA	31.999.850	42.193.820	50.981.000	60.639.971	NA	100,00	96,97	90,51	99,25
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	NA	88.175.300	90.053.760	125.000.000	107.554.510	NA	85.606.977	89.827.180	124.081.635	106.773.197	NA	97,09	99,75	99,27	99,27
Program Pemberdayaan Sosial															
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota															
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	15.000.000	6.552.500	55.199.255	NA	NA	14.849.810	6.465.500	52.107.680	NA	NA	99,00	98,67	94,40
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	126.000.000	200.000.000	200.000.000	302.900.282	NA	126.000.000	198.239.720	199.128.465	299.728.439	NA	100,00	99,12	99,56	98,95
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	15.000.000	107.349.000	61.750.000	NA	NA	14.939.970	104.186.855	59.708.800	NA	NA	99,60	97,05	96,69
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>															

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial															
Penyediaan Alat Bantu	NA	NA	NA	580.100.000	210.191.656	NA	NA	NA	469.874.800	188.560.986	NA	NA	NA	81,00	89,71
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	NA	NA	NA	7.000.000	15.000.000	NA	NA	NA	6.237.554	11.594.700	NA	NA	NA	89,11	77,30
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	NA	100.424.500	2.308.985.000	2.457.309.500	1.274.914.300	NA	98.939.980	1.616.738.665	1.811.909.500	1.172.825.800	NA	98,52	70,02	73,74	91,99
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	NA	79.418.000	30.000.000	86.400.000	90.984.660	NA	78.713.637	29.732.250	80.446.173	90.303.962	NA	99,11	99,11	93,11	99,25
Pemberian Layanan Kedaruratan	NA	NA	41.400.000	245.402.780	182.797.944	NA	NA	41.106.250	218.586.965	169.199.990	NA	NA	99,29	89,07	92,56
Pemberian Layanan Rujukan	NA	NA	NA	15.000.000	15.000.000	NA	NA	NA	11.823.555	14.834.275	NA	NA	NA	78,82	98,90
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial															
Penyediaan Permakanan	NA	73.705.600	76.214.560	98.500.000	93.189.851	NA	65.128.802	76.214.335	88.083.875	87.295.570	NA	88,36	100,00	89,43	93,67
Penyediaan Sandang	NA	10.489.000	10.489.000	31.500.000	20.440.000	NA	10.488.955	10.484.185	31.499.925	20.408.050	NA	100,00	99,95	100,00	99,84
Pemberian Layanan Rujukan	NA	20.840.400	15.000.000	60.000.000	20.000.000	NA	20.241.640	14.997.600	59.053.233	19.990.330	NA	97,13	99,98	98,42	99,95
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>															

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar															
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	NA	NA	50.000.000	90.000.000	79.465.000	NA	NA	48.870.055	86.816.706	79.351.505	NA	NA	97,74	96,46	99,86
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	NA	119.542.500	171.487.000	200.000.000	449.937.520	NA	117.808.891	142.132.680	184.394.875	430.936.391	NA	98,55	82,88	92,20	95,78
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	NA	118.647.000	138.983.880	220.040.000	792.081.720	NA	118.407.757	138.774.277	216.287.229	774.104.172	NA	99,80	99,85	98,29	97,73
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	NA	NA	6.711.781.476	8.725.101.157	7.582.111.559	NA	NA	6.328.425.991	8.611.075.660	7.507.322.300	NA	NA	94,29	98,69	99,01
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	NA	NA	50.000.000	60.000.000	79.950.800	NA	NA	47.044.185	51.461.392	75.920.918	NA	NA	94,09	85,77	94,96
<b>Program Penanganan Bencana</b>															
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota															
Penyediaan Makanan	NA	52.803.700	58.543.000	97.876.150	168.032.000	NA	52.800.100	58.495.295	97.745.665	167.789.800	NA	99,99	99,92	99,87	99,86
Penyediaan Sandang	NA	NA	40.000.000	50.000.000	73.950.000	NA	NA	36.411.140	45.359.245	71.904.660	NA	NA	91,03	90,72	97,23
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	NA	NA	40.000.000	90.000.000	88.600.000	NA	NA	38.645.228	89.542.860	87.742.365	NA	NA	96,61	99,49	99,03
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	NA	NA	40.000.000	42.123.850	72.900.000	NA	NA	38.511.980	34.396.023	67.214.970	NA	NA	96,28	81,65	92,20
Pelayanan Dukungan Psikososial	NA	NA	40.000.000	50.000.000	88.976.000	NA	NA	25.142.445	45.085.904	87.908.185	NA	NA	62,86	90,17	98,80
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota															
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	NA	NA	25.000.000	50.000.000	82.000.000	NA	NA	24.999.960	49.727.212	78.455.790	NA	NA	100,00	99,45	95,68
<b>Program Keluarga Berencana</b>															

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana</i>	191.043.470	NA	NA	NA	NA	191.031.680	NA	NA	NA	NA	99,99	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Integrasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja Melalui Momentum</i>	13.052.410	NA	NA	NA	NA	13.032.290	NA	NA	NA	NA	99,85	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Optimalisasi KIE dan Konseling KKBP</i>	17.040.785	NA	NA	NA	NA	17.040.575	NA	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)</i>	938.247.000	NA	NA	NA	NA	579.729.409	NA	NA	NA	NA	61,79	NA	NA	NA	NA
<i>Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)</i>	6.304.282.000	NA	NA	NA	NA	5.080.772.211	NA	NA	NA	NA	80,59	NA	NA	NA	NA
<b>Program Pembangunan Ketahanan Keluarga</b>															
<i>Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga</i>	187.041.575	NA	NA	NA	NA	187.041.575	NA	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Advokasi dan KIE Kampung KB Bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten Pencanaan dan Evaluasi Kampung KB</i>	21.960.085	NA	NA	NA	NA	21.960.085	NA	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
<b>Program Pengendalian Penduduk</b>															
<i>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>															
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	NA	NA	NA	85.851.800	60.000.000	NA	NA	NA	85.848.035	59.955.123	NA	NA	NA	100,00	99,93
<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	NA	97.033.500	95.000.000	95.000.000	129.585.833	NA	92.674.167	94.735.650	94.987.225	129.535.704	NA	95,51	99,72	99,99	99,96
<i>Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>	NA	NA	NA	292.800.000	296.400.000	NA	NA	NA	292.800.000	294.700.000	NA	NA	NA	100,00	99,43

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	NA	NA	NA	86.398.200	86.398.200	NA	NA	NA	86.398.200	85.991.360	NA	NA	NA	100,00	99,53
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	NA	NA	29.150.460	80.000.000	39.938.085	NA	NA	28.947.640	79.861.268	39.922.170	NA	NA	99,30	99,83	99,96
<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>															
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal															
Pengendalian Program KKBPK		7.087.251.000	14.348.302.000	80.000.000	80.000.000		6.023.430.552	10.670.396.541	75.000.000	79.960.000		84,99	74,37	93,75	99,95
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	NA	NA	NA	948.700.000	1.032.400.000	NA	NA	NA	928.674.061	1.020.112.876	NA	NA	NA	97,89	98,81
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	NA	NA	NA	273.000.000	315.000.000	NA	NA	NA	267.935.000	314.960.000	NA	NA	NA	98,14	99,99
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	NA	NA	NA	150.000.000	150.000.000	NA	NA	NA	147.920.000	149.670.900	NA	NA	NA	98,61	99,78
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	NA	NA	40.000.000	90.000.000	61.930.000	NA	NA	39.999.830	89.979.810	61.793.287	NA	NA	100,00	99,98	99,78

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	NA	NA	NA	120.000.000	250.000.000	NA	NA	NA	119.015.000	249.933.110	NA	NA	NA	99,18	99,97
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	NA	247.250.000	1.151.590.000	NA	NA	NA	242.584.000	1.077.652.545	NA	NA	NA	98,11	93,58	NA	NA
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)															
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	NA	NA	NA	744.000.000	1.116.000.000	NA	NA	NA	744.000.000	1.116.000.000	NA	NA	NA	100,00	100,00
Pembinaan IMP dan Program KKBPk di lini lapangan oleh PKB/PLKB	NA	NA	NA	266.000.000	NA	NA	NA	NA	264.800.000	NA	NA	NA	NA	99,55	
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota															
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	NA	161.115.000	120.000.000	195.000.000	461.400.000	NA	151.430.000	119.902.975	187.268.435	447.317.701	NA	93,99	99,92	96,04	96,95
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	NA	NA	NA	3.662.610.000	3.817.088.000	NA	NA	NA	2.898.050.000	3.516.967.909	NA	NA	NA	79,13	92,14
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	NA	NA	NA	1.851.649.000	2.741.000.000	NA	NA	NA	1.654.146.675	2.629.563.110	NA	NA	NA	89,33	95,93
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	NA	NA	NA	25.500.000	34.200.000	NA	NA	NA	25.493.500	34.050.500	NA	NA	NA	99,97	99,56

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	NA	NA	NA	9.000.000	3.750.000	NA	NA	NA	8.992.000	3.750.000	NA	NA	NA	99,91	100,00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	NA	42.455.000	40.000.000	2.585.500.000	1.511.340.200	NA	42.104.900	39.994.215	2.578.446.645	1.510.363.695	NA	99,18	99,99	99,73	99,94
<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>															
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Kelurga Sejahtera	NA	NA	NA	NA	90.001.800	NA	NA	NA	NA	90.001.800	NA	NA	NA	NA	100,00
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	NA	NA	72.000.000	140.000.000	210.575.181	NA	NA	71.999.840	139.858.940	210.507.411	NA	NA	100,00	99,90	99,97
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	NA	NA	NA	360.000.000	300.000.000	NA	NA	NA	349.200.000	298.080.000	NA	NA	NA	97,00	99,36

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	NA	NA	NA	6.344.700.000	NA	NA	NA	NA	6.344.699.850	NA	NA	NA	NA	100,00	NA
<b>Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan</b>															
Pemantauan data dan informasi keluargaberesiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran,baduta/balita)	NA	NA	NA	NA	3.003.000.000	NA	NA	NA	NA	3.003.000.000	NA	NA	NA	NA	100,00
Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran,baduta/balita)	NA	NA	NA	NA	3.303.300.000	NA	NA	NA	NA	3.303.300.000	NA	NA	NA	NA	100,00
<b>Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak</b>															
<i>Kegiatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG)</i>	27.723.480	NA	NA	NA	NA	27.035.350	NA	NA	NA	NA	97,52	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)</i>	30.129.490	NA	NA	NA	NA	29.899.410	NA	NA	NA	NA	99,24	NA	NA	NA	NA
<i>Kegiatan Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak</i>	88.930.090	NA	NA	NA	NA	88.429.990	NA	NA	NA	NA	99,44	NA	NA	NA	NA

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	74.860.640	NA	NA	NA	NA	74.501.964	NA	NA	NA	NA	99,52	NA	NA	NA	NA
<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>															
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota  (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG)	NA	NA	158.000.000	160.000.000	124.622.647	NA	NA	155.764.205	157.288.110	123.682.879	NA	NA	98,58	98,31	99,25
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	NA	NA	50.217.500	60.000.000	48.553.840	NA	NA	50.217.380	59.811.855	48.157.520	NA	NA	100,00	99,69	99,18
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	37.650.000	80.098.880	60.000.000	95.728.723	NA	37.649.870	78.124.475	56.088.535	93.199.483	NA	100,00	97,54	93,48	97,36
<b>Program Perlindungan Perempuan</b>															
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	225.915.000	225.900.000	250.000.000	259.415.000	NA	50.517.700	129.388.575	216.827.398	239.284.379	NA	22,36	57,28	86,73	92,24
<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	141.214.670	200.282.590	252.508.960	295.481.802	NA	139.196.957	200.101.350	248.584.802	295.238.351	NA	98,57	99,91	98,45	99,92
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>															
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota															
Koordinasi & Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	NA	225.915.000	225.900.000	NA	NA	NA	75.235.150	155.982.831	NA	NA	NA	33,30	69,05	NA	NA

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	253.750.000	NA	NA	NA	NA	210.812.305	NA	NA	NA	NA	83,08	NA
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	NA	NA	NA	NA	261.815.000	NA	NA	NA	NA	260.269.982	NA	NA	NA	NA	99,41
TOTAL	11.196.520.315	14.395.402.155	33.522.920.266	38.164.252.511	39.542.071.970	9.291.278.620	12.599.223.769	27.878.293.568	35.935.246.669	38.429.854.005	82,98	87,52	83,16	94,16	97,19

Berdasarkan Tabel 2.7 rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki kecenderungan naik. Penurunan realisasi anggaran terjadi pada tahun 2022, hal ini secara signifikan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah realisasi Sub Kegiatan dengan sumber anggaran DAK Non Fisik BOKB, dimana Sub Kegiatan tersebut merupakan Sub Kegiatan yang memiliki anggaran paling besar, tidak dapat terserap maksimal akibat sedang terjadi puncak pandemi Covid-19. Sub Kegiatan dengan sumber anggaran DAK Non Fisik BOKB mengalami kendala pelaksanaan karena hampir sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan di lapangan yang melibatkan pengumpulan orang, sedangkan disisi lain pemerintah masih menerapkan beberapa larangan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Selain itu, realisasi Bantuan Sosial (bansos) tidak maksimal pada tahun 2022 tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa calon penerima bansos telah meninggal dunia serta terdapat pula beberapa calon penerima yang telah menerima bansos lain seperti PKH, BPNT, dan KJS. Sehingga calon penerima tersebut digagalkan untuk menghindari duplikasi penerimaan bantuan.

Namun demikian, tren realisasi pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan, dan kenaikan tertinggi tercapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 97,19%. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain adalah strategi kolaborasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada jadwal yang telah disusun sebelumnya, serta rapat koordinasi internal terkait evaluasi kegiatan pada setiap triwulan sehingga kendala pencapaian target dapat dibahas bersama untuk mendapatkan solusi.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang memiliki kelompok sasaran layanan yang secara tugas dan fungsi organisasi berkaitan langsung dengan tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan organisasi, Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang memiliki kelompok sasaran layanan, sebagai berikut:

##### **1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

PPKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hal ini mencakup Anak Balita Terlantar,

Anak Terlantar, Anak yang Mengalami Masalah Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekekrasan, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas/Waria, Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat, Orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan Napza, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

2) Perempuan dan Anak

Kelompok sasaran perempuan dan anak mencakup semua kelompok usia dengan fokus kepada upaya perlindungan dan pemberdayaan dari perlakuan diskriminasi, kekerasan, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Pada kelompok sasaran perempuan, program-program Dinsos PPKB PPPA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, serta memastikan kesetaraan gender. Sedangkan untuk kelompok sasaran Anak, berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, dari anak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun.

3) Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dalam konteks sasaran layanan, Dinsos PPKB PPPA fokus kepada Balita, Remaja, Lansia, Keluarga yang memiliki Balita, Keluarga yang memiliki Remaja, dan Keluarga yang memiliki Lansia, serta Keluarga Risiko Stunting.

4) Pasangan Usia Subur (PUS)

PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15- 49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid. PUS menjadi sasaran kegiatan Dinsos PPKB PPPA dalam keterkaitannya dengan pengaturan dan/atau pembatasan kelahiran dengan alat dan obat kontrasepsi (alokon).

## 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOS PPKB PPPA

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Perangkat Daerah, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian lingkungan internal dan eksternal organisasi. Terkait dengan analisis lingkungan organisasi, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi peluang maupun tantangan yang akan dihadapi oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

### A. Tantangan

- 1) Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PPKS dan korban bencana.
- 4) Terbatasnya layanan perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan kepada PPKS dan korban bencana.
- 5) Tingginya angka *unmet need*.
- 6) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan (poktan) ketahanan keluarga.
- 7) Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pembangunan kualitas keluarga.
- 8) Rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Belum optimalnya kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.
- 10) Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

### B. Peluang

- 1) Terselenggaranya Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesmas – SLRT) di tingkat kabupaten dan desa.
- 2) Adanya regulasi terkait pemberian bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar, baik bansos terencana maupun bansos tidak terencana yang menyasar masyarakat miskin dan rentan.
- 3) Tersedianya alokasi DAK yang cukup besar untuk penyelenggaraan kegiatan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengatur jumlah kelahiran, sehingga penduduk dapat terkendali dan kualitas keluarga dapat ditingkatkan.
- 5) Adanya regulasi terkait kegiatan-kegiatan untuk mengkomodifikasi pemenuhan hak anak yang berbasis masyarakat (Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Pembentukan Ruang Bersama Indonesia).
- 6) Adanya mitra kerja dari kalangan masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dinsos PPKB PPPA (Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, PPKBD, Kader PPT Kecamatan, dll).

### **2.2.1. Telaah Rencana Strategis Kementerian Terkait dan Perangkat Daerah Provinsi Terkait**

Dalam melakukan identifikasi isu strategis Dinsos PPKB PPPA, salah satu hal yang dapat menjadi dasar pertimbangan adalah Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terkait. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang yang mengampu pada 3 (tiga) urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Renstra yang dapat dijadikan dasar adalah Renstra Kementerian Sosial, Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

#### **1) Rencana Strategis Kementerian Sosial**

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan visi dan misi Presiden pada bidang Sosial. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus prioritas nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan Sosial, Kementerian Sosial mendukung langsung pada pencapaian misi ke-4 dan ke-6, yaitu:

##### **a. Misi Nomor 4**

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

b. Misi Nomor 5

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut Kementerian Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan.
- b. Tata kelola Kementerian Sosial yang agile, berkualitas, dan efisien.

Sebagai upaya untuk memastikan pencapaian tujuan, Kementerian Sosial menetapkan sasaran, yaitu:

- a. Terwujudnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif.
- b. Meningkatnya tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak.

2) Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mendukung Misi Nomor 4, yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Untuk mencapai misi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menetapkan tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas”, serta sasaran strategis kementerian sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga.
- b. Meningkatnya pencegahan kehamilan di usia 15-19 tahun.
- c. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- d. Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat.

3) Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membantu mewujudkan Asta Cita mendukung pada misi pertama dan keempat, yaitu:

a. Misi Nomor 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

b. Misi Nomor 4

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Sebagai upaya pencapaian misi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan dan sasaran strategis. Adapun yang menjadi tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- b. Terwujudnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap Perempuan.
- b. Meningkatnya Pemenuhan Hak Universal, Resiliensi, serta Perlindungan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya
- c. Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Proses Pembangunan.
- d. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang andal.

4) Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pencapaian sasaran ke-3 Provinsi Jawa Tengah, yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter”, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, yaitu:

- a. Menurunkan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah berintegritas dan dinamis.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - b. Menurunkan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin;
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - d. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah.
- 5) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Dalam pencapaian sasaran Provinsi Jawa Tengah, yaitu Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui indikator Indeks Modal Manusia yang dijabarkan dalam Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
- b. Meningkatnya keluarga berkualitas.

Untuk sasaran perangkat daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perlindungan anak.
- b. Meningkatnya peran perempuan dalam bidang pembangunan.
- c. Terkendalinya jumlah penduduk.
- d. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

### **2.2.2. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinsos PPKB PPPA**

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tiga urusan, Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang tidak lepas dari berbagai permasalahan terutama dalam melaksanakan pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan berbagai tantangan yang dihadapi selama periode perencanaan, Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang menghadapi sejumlah permasalahan yang saling terkait sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif.

Permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah menjadi pembuka identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Berdasarkan kondisi dari hasil evaluasi terhadap pencapaian Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang selama periode pemerintahan sebelumnya serta telaah dari Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Perangkat Daerah Provinsi terkait, maka dapat dilihat isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam periode perencanaan tahun 2025 – 2029, antara lain:

- 1) Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan.
- 2) Peningkatan partisipasi perempuan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Peningkatan kualitas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

**Tabel 2.8**  
**Isu Strategis Dinsos PPKB PPPA**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sosial	Belum optimalnya rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial	Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Kemiskinan dan keadilan sosial yang memicu adanya konflik sosial	Belum optimalnya sistem perlindungan dan jaminan sosial nasional	Masih lemahnya sinergi antara Pemerintah Daerah maupun stakeholder lain dalam penanganan PPKS	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Subordinasi dan marginalisasi perempuan	Kekerasan berbasis gender dan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kesetaraan gender	Peningkatan partisipasi perempuan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Penguatan keluarga berencana untuk perwujudan keluarga berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka TFR pada negara-negara maju di dunia</li> <li>• Pembangunan kualitas ketahanan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka TFR di Indonesia</li> <li>• Peningkatan pemberdayaan ketahanan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka TFR di kabupaten/kota</li> <li>• Peran dan fungsi kelompok kegiatan ketahanan keluarga</li> </ul>	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINSOS PPKB PPPA TAHUN 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. Penentuan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Visi pembangunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah **“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera“ atau Magelang Anyar Gress**. Untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana diperlukan adanya misi sebagai sebuah garis besar upaya pencapaian. Misi dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 5 (lima) misi utama (**Panca Dharma**) sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi dijabarkan melalui program prioritas daerah. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan **“Sapta Cipta”**. Ketujuh Program Unggulan yang dilakukan mulai dari tahun pertama dan diprioritaskan tersebut meliputi:

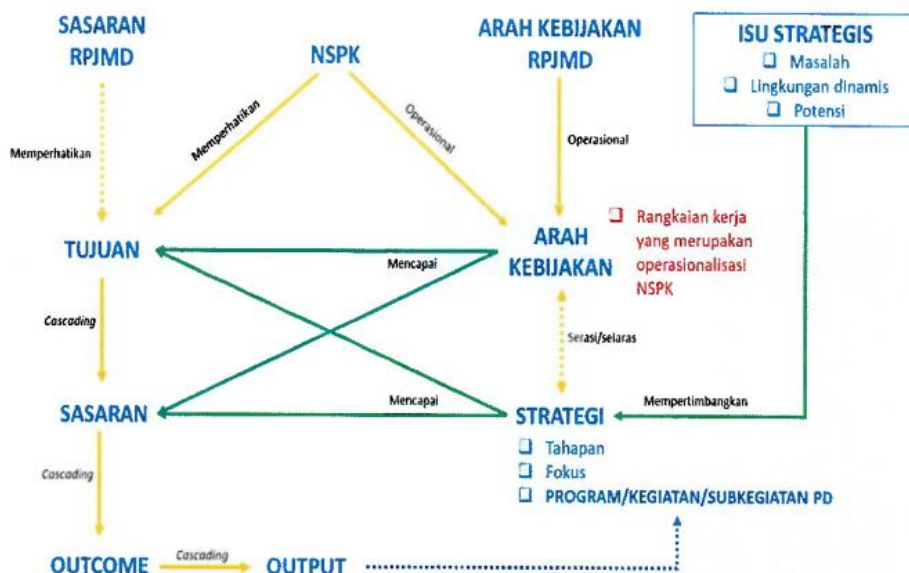
1. **Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe** (misi 1)
  - a. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Umum.
  - b. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama.
  - c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/SMK/SLB).

- d. Fasilitasi bakat minat anak untuk meraih prestasi Akademik dan Non Akademik.
  - e. Program bantuan beasiswa jenjang sarjana untuk pemuda berbasis desa.
  - f. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
  - g. Jaminan Kesehatan bagi tenaga kependidikan Agama.
2. **Sehat Wargane** (misi 1)
- a. Pembangunan Rumah Sakit tipe D.
  - b. Optimalisasi sarana pra sarana dan pelayanan Rumah Sakit.
  - c. Bebas biaya perawatan RS bagi warga ber-KTP Magelang.
  - d. Dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui.
  - e. Peningkatan kesejahteraan sopir ambulance desa.
3. **Makmur Rakyat** (misi 3 dan misi 4)
- a. Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi).
  - b. Rekonstruksi jalan tambang.
  - c. Program rumah layak.
  - d. Program pemenuhan air bersih dan Sanitasi Aman Magelang (SAM).
  - e. Pengentasan kemiskinan secara terpadu.
  - f. Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem.
4. **Gemilang Potensine** (misi 3)
- a. Program Agroindustri dan Agrotourism (Agro-Twin).
  - b. Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
  - c. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif.
  - d. Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Peternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah.
  - e. Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata.
  - f. Fasilitasi potensi dan destinasi Wisata berbasis budaya.
  - g. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa.
  - h. Mendorong pasar tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
  - i. Program Magelang Investasi: Menciptakan iklim investasi yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, tata kelola dan sektor unggulan.
5. **Ngelayani Birokrasine** (misi 2)
- a. Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja daerah berbasis *merit system*.

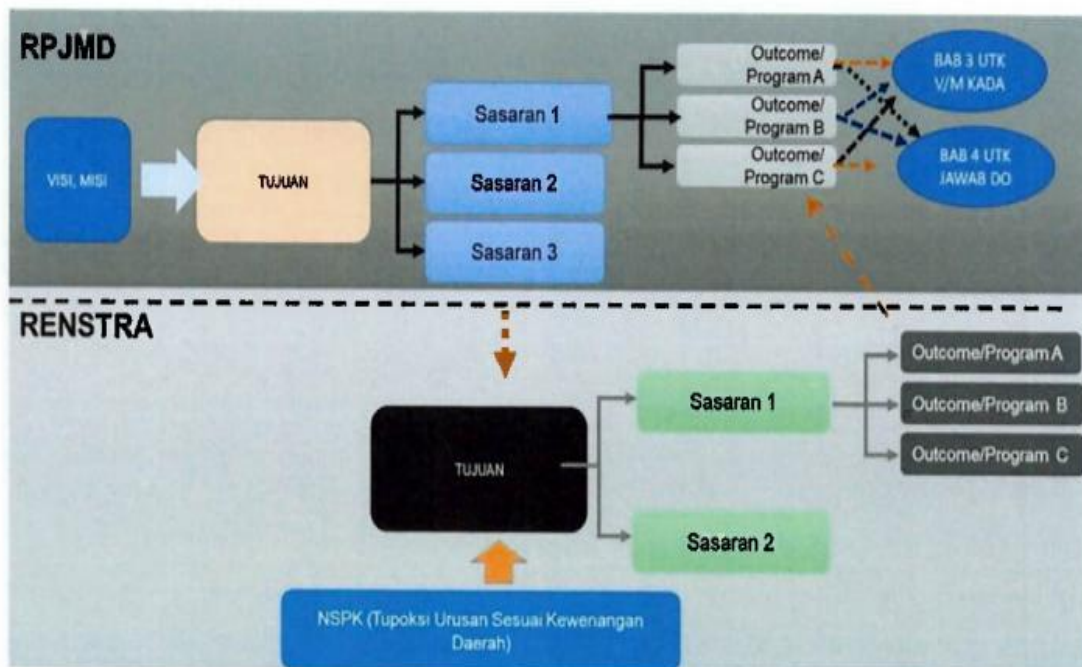
- b. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa.
  - c. Peningkatan mutu pelayanan publik.
  - d. Fasilitasi hukum bagi aparat pemerintah desa.
  - e. Pembangunan database berbasis desa.
  - f. Jaminan Kesehatan pasca purna tugas bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.
  - g. Jaminan Kesehatan bagi BPD, RT, RW.
  - h. Penyelenggaraan ruang aspirasi Bupati di kantor kecamatan.
6. **Gumregrah Wargane** (misi 3)
- a. Fasilitasi kegiatan keagamaan.
  - b. Fasilitasi kegiatan kebudayaan.
  - c. Fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - d. Pembentukan Unit Trauma Center Kabupaten Magelang.
  - e. Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah.
  - f. Pembangunan Taman Budaya Rakyat (TBR).
  - g. Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga.
  - h. Fasilitasi kegiatan olahraga.
  - i. Fasilitasi atlet olahraga berprestasi.
7. **Lestari Alame** (misi 5)
- a. Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi.
  - b. Konservasi lingkungan hidup dan sumber air.
  - c. Fasilitasi pembentukan Desa tangguh bencana.
  - d. Optimalisasi Kelompok Relawan Tanggap Bencana.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD. Tujuan dan Sasaran memuat indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja tujuan memuat target-target yang harus dicapai pada periode akhir Renstra Perangkat Daerah, sedangkan indikator kinerja sasaran memuat target-target kinerja selama lima tahun yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah. Penetapan tujuan perangkat daerah sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang 2025-2029, sehingga ada keselarasan antara Renstra Dinsos PPKB PPPA dengan Visi, Misi, dan Tujuan Daerah.

**Gambar 3.1**  
**Konsep Renstra Perangkat Daerah**



**Gambar 3.2**  
**Kerangka Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**



Sebagai perangkat daerah yang mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan Sosial, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPKB PPPA dalam menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah berfokus pada ketiga urusan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak, serta meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga

2. Sasaran : a. Meningkatnya akses terhadap perlindungan dan jaminan sosial.
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- c. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga.

Penetapan sasaran Dinsos PPKB PPPA berdasarkan pada masing-masing urusan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi. Pada urusan Sosial, sasaran yang dirumuskan adalah “Meningkatnya akses terhadap perlindungan dan jaminan sosial”. Untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirumuskan sasaran berupa “Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga”. Sedangkan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan sasaran “Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak”.

Tujuan ditetapkannya sasaran pada masing-masing urusan adalah untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam setiap urusan mengenai apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan, sasaran, indikator tujuan, serta indikator sasaran Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. 2. Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak 3. Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak, serta meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Persentase Penurunan PPKS	1,15%	1,17%	1,19%	1,21%	1,23%	1,25%	1,28%	
			Indeks Pembangunan Gender	92,49	92,95	93,19	93,42	93,65	93,89	94,12	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,83	64,58 – 64,60	65,33 – 65,37	66,08 – 66,15	66,83 – 66,92	67,58 – 67,69	68,33 – 68,46	
		Meningkatnya akses terhadap perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan Penanganan PPKS	85,89%	48,81	49	49,2	49,4	49,6	49,6	Ada perubahan formula perhitungan dari baseline
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender	0,267	0,266 – 0,256	0,264 – 0,245	0,262 – 0,233	0,259 – 0,222	0,257 – 0,211	0,255 – 0,200	
		Indeks Perlindungan Anak	63,39	63,57	63,76	63,94	64,12	64,31	64,50		
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Kebahagiaan	73,2	73,3	73,5	73,7	73,9	74	74,2	

### **3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINSOS PPKB PPPA TAHUN 2025-2029**

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra merupakan hal yang saling terkait dan merupakan sesuatu yang esensial dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi juga merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman yang lebih terperinci dan bersifat spesifik sebagai arah pelaksanaan strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Strategi Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan oleh organisasi yang diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinsos PPKB PPPA. Adapun strategi Dinsos PPKB PPPA dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 antara lain:

1. Meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.
2. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatkan Pelayanan Program Keluarga Berencana serta kualitas kependudukan dan pembangunan keluarga.

Dalam melaksanakan strategi untuk mencapai target tujuan dan sasaran diperlukan sebuah penahapan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahunan. Penahapan Renstra Dinsos PPKB PPPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4****Penahapan Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan data untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat upaya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat rentan, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kesertaan dalam keluarga berencana, kualitas kependudukan dan pembangunan kualitas keluarga.	Akselerasi peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan pengarusutamaan gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak, serta kesertaan keluarga berencana dan peningkatan kualitas keluarga.	Pemantapan sistem perlindungan dan jaminan sosial, peran perempuan dalam pembangunan, sistem perlindungan perempuan dan anak, pembangunan kualitas keluarga dan kesertaan dalam keluarga berencana	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang merata, pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, serta keluarga yang berkualitas.

Arah kebijakan merupakan sebuah pedoman yang ditetapkan oleh organisasi dalam melaksanakan setiap kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Penetapan arah kebijakan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan daerah. Keterkaitan antara arah kebijakan Dinsos PPKB PPPA dengan arah kebijakan RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5**

**Arah Kebijakan Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan	Meningkatkan cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam penanganan PPKS	
			Peningkatan akses layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan korban bencana	
2	Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan.	Peningkatan Advokasi Pengarusutamaan Gender	
3		Meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan	Peningkatan sistem pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	
4		Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak	Peningkatan advokasi terhadap upaya pemenuhan hak anak	
			Peningkatan sistem pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
5		Meningkatkan keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB.	Peningkatan KIE keikutsertaan ber-KB MKJP dan KB Pasca Persalinan	
6		Meningkatkan ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana.	Peningkatan advokasi dan koordinasi dengan jejaring fasyankes pelayanan KB	
7		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Peningkatan pemberdayaan Kampung KB dan upaya peningkatan kualitas keluarga	

## BAB IV

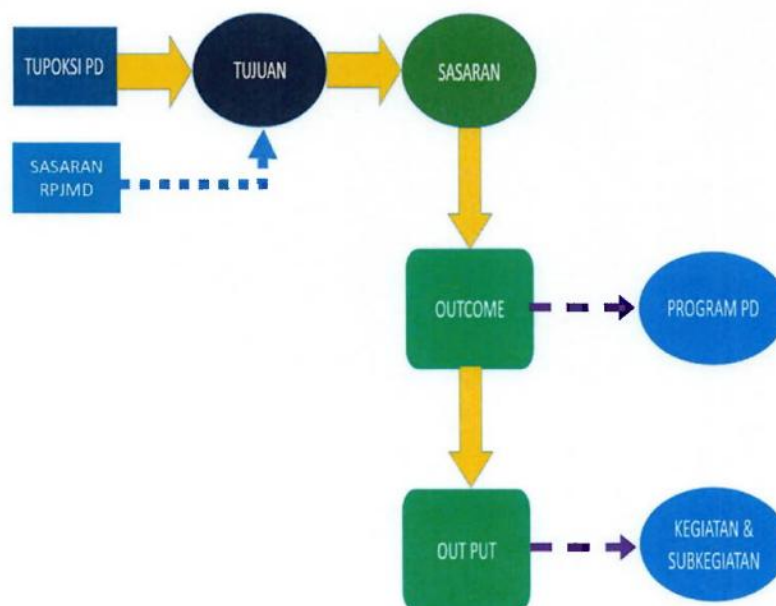
### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DINSOS PPKB PPPA

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinsos PPKB PPPA adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Magelang 2025-2029.

**Gambar 4.1**

#### Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut juga mengacu pada nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Adapun perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan RPJMD tersebut dapat dilihat melalui Tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**

**Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak, serta meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga				Persentase penurunan PPKS		
Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak					Indeks Pembangunan Gender		
Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga					Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)		
		Meningkatnya akses terhadap perlindungan dan jaminan sosial			Cakupan penanganan PPKS		
			Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		Persentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		
			Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD dan lapporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Tersusunnya laporan keuangan		Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlayannya administrasi kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
				Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
					<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
			Terlaksananya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani***	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial			1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/** 2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/** 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/** 4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/** 5. Persentase Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ***	Program Rehabilitasi Sosial	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
			Terlaksananya rehabilitasi PPKS di Rumah Singgah		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis, dan PPKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan***	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Terpeliharanya anak-anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
				Terkelolanya data fakir miskin yang akurat untuk penanganan kemiskinan	Jumlah Fakir Miskin yang tertangani	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana **/**	Program Penanganan Bencana	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET		
	1	2	3	4	5	6	7		
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial			
				Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dalam masyarakat	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak					Indeks Ketimpangan Gender		
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
		Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)***	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
					Meningkatnya pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah	Jumlah Lembaga yang melaksanakan PUG	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		
							<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
					Meningkatnya pemberdayaan dan kompetensi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang terlibat dalam bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	
				Meningkatnya kemampuan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam memberikan pelayanan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg dibina	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kotayang Tersedia</i>	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif***	Program Perlindungan Perempuan	
				Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang berkualitas	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Koordinasi &amp; Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
				Terlaksananya KIE dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
				Meningkatnya kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
				Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)***	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Meningkatnya pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA yang terbentuk	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak-anak		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif***	Program Perlindungan Khusus Anak	
				Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</i>	<i>Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
				Terlaksananya KIE dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>	<i>Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA</i>	Sub Kegiatan Tahun 2025
				Meningkatnya kualitas lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah lembaga layanan perlindungan khusus anak yang mendapatkan penguatan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Tahun 2025
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga			Indeks Kebahagiaan		
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)***	Program Pengendalian Penduduk	
				Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	ASFR 15 - 19	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam			1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)***	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
			pembinaan Keluarga Berencana (KB)		2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi*** 3. Persentase Kampung KB Mandiri 4. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern		
				Terlaksananya advokasi dan KIE program Bangga Kencana	1. Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) 2. Jumlah kecamatan yang melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Meningkatnya pemberdayaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB yang diberdayakan	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di faskes mitra kerja dan masyarakat	Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga*** Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Remaja	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah desa yang menyelenggarakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

Dalam menjalankan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan diperlukan indikator sebagai alat ukur, target sebagai ketentuan yang harus dicapai, serta pendanaan sebagai pendukung pelaksanaan. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, target, dan pendanaan Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 secara terperinci dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3**

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG URUSAN SOSIAL												
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100% %</b>	<b>100</b>	<b>7.746.257.423</b>	<b>100</b>	<b>7.475.487.399</b>	<b>100</b>	<b>7.764.194.193</b>	<b>100</b>	<b>7.975.693.940</b>	<b>100</b>	<b>7.746.257.423</b>
	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100% %</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah</b>	<b>27 dokumen</b>	<b>40</b>	<b>18.000.000</b>	<b>40</b>	<b>16.000.000</b>	<b>40</b>	<b>16.000.000</b>	<b>40</b>	<b>18.000.000</b>	<b>41</b>	<b>18.000.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	9	8.000.000	9	8.000.000	9	8.000.000	9	8.000.000	10	8.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD dan lapporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25 laporan	31	10.000.000	31	8.000.000	31	8.000.000	31	10.000.000	31	10.000.000
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan yang disusun</b>	<b>NA laporan</b>	<b>15</b>	<b>6.035.244.119</b>	<b>15</b>	<b>6.137.001.115</b>	<b>15</b>	<b>6.239.846.660</b>	<b>15</b>	<b>6.343.944.037</b>	<b>15</b>	<b>6.323.744.119</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	41	5.986.864.146	41	6.081.364.146	41	6.175.864.146	41	6.270.364.146	41	6.270.364.146

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	13 dokumen	45	48.379.973	45	55.636.969	45	63.982.514	45	73.579.891	45	53.379.973
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya</b>	<b>NA orang</b>	<b>41</b>	<b>70.000.000</b>	<b>41</b>	<b>40.500.000</b>	<b>41</b>	<b>60.000.000</b>	<b>41</b>	<b>60.000.000</b>	<b>41</b>	<b>50.000.000</b>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	41	70.000.000	41	40.500.000	41	60.000.000	41	60.000.000	41	50.000.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>NA layanan</b>	<b>4</b>	<b>131.468.784</b>	<b>4</b>	<b>125.441.764</b>	<b>4</b>	<b>136.786.333</b>	<b>4</b>	<b>137.688.703</b>	<b>4</b>	<b>125.468.784</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	423 laporan	4	131.468.784	4	125.441.764	4	136.786.333	4	137.688.703	4	125.468.784
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>NA paket</b>	<b>6</b>	<b>305.000.000</b>	<b>4</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4</b>	<b>180.000.000</b>	<b>6</b>	<b>295.500.000</b>	<b>6</b>	<b>187.500.000</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	39 unit	5	75.000.000	4	50.000.000	4	80.000.000	7	100.000.000	7	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10	230.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	10	195.500.000	10	137.500.000
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>NA Layanan</b>	<b>2</b>	<b>166.561.200</b>	<b>2</b>	<b>161.561.200</b>	<b>2</b>	<b>166.561.200</b>	<b>2</b>	<b>171.561.200</b>	<b>2</b>	<b>171.561.200</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	5000	45.000.000	5000	40.000.000	5000	45.000.000	5000	50.000.000	5000	50.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	142 laporan	36	121.561.200	36	121.561.200	36	121.561.200	36	121.561.200	36	121.561.200

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>NA Unit</b>	<b>150</b>	<b>1.019.983.320</b>	<b>150</b>	<b>869.983.320</b>	<b>150</b>	<b>965.000.000</b>	<b>150</b>	<b>949.000.000</b>	<b>150</b>	<b>869.983.320</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	123 unit	122	494.983.320	122	494.983.320	122	500.000.000	122	500.000.000	122	494.983.320
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	28	25.000.000	28	25.000.000	28	25.000.000	28	29.000.000	28	25.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	3	500.000.000	3	350.000.000	3	440.000.000	3	420.000.000	3	350.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial</b>	<b>85 %</b>	<b>90</b>	<b>447.000.000</b>	<b>92</b>	<b>429.000.000</b>	<b>92</b>	<b>430.000.000</b>	<b>95</b>	<b>460.000.000</b>	<b>95</b>	<b>447.000.000</b>
<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan</b>	<b>247 orang</b>	<b>146</b>	<b>417.000.000</b>	<b>146</b>	<b>404.000.000</b>	<b>146</b>	<b>405.000.000</b>	<b>176</b>	<b>435.000.000</b>	<b>176</b>	<b>422.000.000</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	NA orang	96	337.000.000	96	324.000.000	96	325.000.000	96	350.000.000	96	337.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	43 lembaga	45	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	85.000.000	50	85.000.000
<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>NA kegiatan</b>	<b>10</b>	<b>30.000.000</b>	<b>10</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10</b>	<b>25.000.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	NA dokumen	10	30.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani***</b>	<b>NA %</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>
<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>NA %</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	NA orang	5	30.000.000	5	40.000.000	7	40.000.000	10	50.000.000	10	30.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***</b>	100 %	100	2.526.701.658	100	2.500.701.658	100	2.520.701.658	100	2.575.701.658	100	2.526.701.658
	<b>2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***</b>	100 %	100		100		100		100		100	
	<b>3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***</b>	100 %	100		100		100		100		100	
	<b>4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***</b>	100 %	100		100		100		100		100	
	<b>5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ***</b>	0,63 %	0,63		0,63		0,63		0,63		0,63	
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	2636 orang	1.190	2.356.701.658	1.215	2.330.701.658	1.220	2.345.701.658	1.230	2.355.701.658	1.230	2.356.701.658
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	40	160.701.658	45	170.701.658	50	170.701.658	60	160.701.658	60	160.701.658

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	43 orang	30	15.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1654 orang	630	1.900.000.000	650	1.900.000.000	650	1.900.000.000	650	1.900.000.000	650	1.900.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	320 orang	150	56.000.000	150	55.000.000	150	50.000.000	150	55.000.000	150	56.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 orang	300	210.000.000	300	180.000.000	300	200.000.000	300	210.000.000	300	210.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	89 orang	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis, dan PPKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah</b>	<b>82 orang</b>	<b>83</b>	<b>170.000.000</b>	<b>86</b>	<b>170.000.000</b>	<b>90</b>	<b>175.000.000</b>	<b>93</b>	<b>220.000.000</b>	<b>93</b>	<b>170.000.000</b>

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	82 orang	83	120.000.000	86	120.000.000	90	120.000.000	93	130.000.000	93	120.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	82 orang	83	25.000.000	86	25.000.000	90	25.000.000	93	45.000.000	93	25.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	63 orang	75	25.000.000	78	25.000.000	80	30.000.000	82	45.000.000	82	25.000.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan***</b>	<b>NA %</b>	<b>2,18</b>	<b>8.677.088.412</b>	<b>2,2</b>	<b>8.402.088.412</b>	<b>2,2</b>	<b>8.375.088.412</b>	<b>2,21</b>	<b>10.441.088.412</b>	<b>2,21</b>	<b>13.677.088.412</b>
<b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah anak terlantar yang terpelihara</b>	<b>25 anak</b>	<b>25</b>	<b>67.000.000</b>	<b>25</b>	<b>60.000.000</b>	<b>25</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25</b>	<b>81.000.000</b>	<b>25</b>	<b>100.000.000</b>
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 anak	25	67.000.000	25	60.000.000	25	50.000.000	25	81.000.000	25	100.000.000
<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fakir Miskin yang tertangani</b>	<b>528.578 orang</b>	<b>528.000</b>	<b>8.610.088.412</b>	<b>529.000</b>	<b>8.342.088.412</b>	<b>530.000</b>	<b>8.325.088.412</b>	<b>531.000</b>	<b>10.360.088.412</b>	<b>532.000</b>	<b>13.577.088.412</b>
Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	769.854 orang	742.139	410.000.000	715.423	267.000.000	689.668	275.000.000	664.840	450.000.000	664.840	500.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan	NA Usulan	100	440.000.000	105	325.000.000	110	300.000.000	115	500.000.000	120	550.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perbaikan yang dilaksanakan											
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	205.986 keluarga	137.497	7.680.088.412	134.885	7.680.088.412	132.323	7.680.088.412	129.809	9.010.088.412	129.809	12.077.088.412
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 orang	100	80.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**/****</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>509.896.614</b>	<b>100</b>	<b>473.000.000</b>	<b>100</b>	<b>488.000.000</b>	<b>100</b>	<b>491.000.000</b>	<b>100</b>	<b>509.896.614</b>
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	462 orang	350	429.309.786	350	393.000.000	350	403.000.000	350	406.000.000	350	424.309.786
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	462 orang	350	140.000.000	350	140.000.000	350	140.000.000	350	142.000.000	350	145.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	100	73.000.000	100	73.000.000	100	73.000.000	100	74.000.000	100	75.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	NA orang 12 lokasi	40	90.000.000	40	70.000.000	40	70.000.000	40	70.000.000	40	78.000.000
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	75	65.664.222	75	60.000.000	75	65.000.000	75	65.000.000	75	65.664.222
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	395 orang	50	60.645.564	50	50.000.000	50	55.000.000	50	55.000.000	50	60.645.564
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>1 kali</b>	<b>2</b>	<b>80.586.828</b>	<b>2</b>	<b>80.000.000</b>	<b>2</b>	<b>85.000.000</b>	<b>2</b>	<b>85.000.000</b>	<b>2</b>	<b>85.586.828</b>
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	50	80.586.828	50	80.000.000	50	85.000.000	50	85.000.000	50	85.586.828
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)***</b>	<b>25,46 %</b>	<b>25,5</b>	<b>205.000.000</b>	<b>26</b>	<b>165.000.000</b>	<b>26,5</b>	<b>165.000.000</b>	<b>26,5</b>	<b>180.000.000</b>	<b>26,5</b>	<b>205.000.000</b>

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga yang melaksanakan PUG</b>	14 Lembaga	14	100.000.000	14	75.000.000	14	75.000.000	14	80.000.000	14	100.000.000
Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	14	100.000.000	14	75.000.000	14	75.000.000	14	80.000.000	14	100.000.000
<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perempuan yang terlibat dalam bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	550 orang	500	65.000.000	500	60.000.000	500	60.000.000	500	60.000.000	500	65.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1 organisasi	1	65.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg dibina</b>	20 Lembaga	20	40.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	NA Lembaga	20	40.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif***</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>252.206.968</b>	<b>100</b>	<b>252.206.968</b>	<b>100</b>	<b>252.206.968</b>	<b>100</b>	<b>252.206.968</b>	<b>100</b>	<b>252.206.968</b>
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3	166.670.968	3	166.670.968	3	166.670.968	3	166.670.968	3	166.670.968
Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	63 Orang	70	166.670.968	75	166.670.968	75	166.670.968	75	166.670.968	75	166.670.968
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	NA Lembaga	8	50.750.000	8	50.750.000	8	50.750.000	8	50.750.000	8	50.750.000
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	NA Lembaga	8	50.750.000	8	50.750.000	8	50.750.000	8	50.750.000	8	50.750.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan	NA Lembaga	2	34.786.000	2	34.786.000	2	34.786.000	2	34.786.000	2	34.786.000
Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	NA orang	30	34.786.000	30	34.786.000	30	34.786.000	30	34.786.000	30	34.786.000
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)***</b>	<b>60,6 Indeks</b>	<b>60,7</b>	<b>390.000.000</b>	<b>60,7</b>	<b>350.000.000</b>	<b>60,8</b>	<b>350.000.000</b>	<b>60,8</b>	<b>380.000.000</b>	<b>60,8</b>	<b>390.000.000</b>
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA yang terbentuk	15 Lembaga	26	390.000.000	26	350.000.000	26	350.000.000	26	380.000.000	26	390.000.000
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	NA Lembaga	26	390.000.000	26	350.000.000	26	350.000.000	26	380.000.000	26	390.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif***</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>278.385.633</b>	<b>100</b>	<b>278.385.633</b>	<b>100</b>	<b>278.385.633</b>	<b>100</b>	<b>278.385.633</b>	<b>100</b>	<b>278.385.633</b>
<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>3</b>	<b>193.401.633</b>	<b>3</b>	<b>193.401.633</b>	<b>3</b>	<b>193.401.633</b>	<b>3</b>	<b>193.401.633</b>	<b>3</b>	<b>193.401.633</b>
Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	158 orang	80	193.401.633	85	193.401.633	85	193.401.633	90	193.401.633	90	193.401.633
<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>NA Lembaga</b>	<b>8</b>	<b>50.750.000</b>	<b>8</b>	<b>50.750.000</b>	<b>8</b>	<b>50.750.000</b>	<b>8</b>	<b>50.750.000</b>	<b>8</b>	<b>50.750.000</b>
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	NA Kegiatan	3	50.750.000	3	50.750.000	3	50.750.000	3	50.750.000	3	50.750.000
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga layanan perlindungan khusus anak yang mendapatkan penguatan</b>	<b>NA Lembaga</b>	<b>2</b>	<b>34.234.000</b>	<b>2</b>	<b>34.234.000</b>	<b>2</b>	<b>34.234.000</b>	<b>2</b>	<b>34.234.000</b>	<b>2</b>	<b>34.234.000</b>

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	NA orang	30	34.234.000	30	34.234.000	30	34.234.000	30	34.234.000	30	34.234.000
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)***</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>	<b>793.800.000</b>	<b>2,03</b>	<b>717.800.000</b>	<b>2,03</b>	<b>717.800.000</b>	<b>2,03</b>	<b>742.800.000</b>	<b>2,03</b>	<b>793.800.000</b>
<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>ASFR 15-19</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>793.800.000</b>	<b>9,8</b>	<b>717.800.000</b>	<b>9,7</b>	<b>717.800.000</b>	<b>9,7</b>	<b>742.800.000</b>	<b>9,6</b>	<b>793.800.000</b>
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	1	141.000.000	1	105.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	141.000.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	184 Laporan	184	218.400.000	184	218.400.000	184	218.400.000	184	218.400.000	184	218.400.000
Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	1	239.400.000	1	239.400.000	1	239.400.000	1	239.400.000	1	239.400.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	1	35.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000
Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	258 unit	258	100.000.000	286	70.000.000	314	75.000.000	342	95.000.000	372	100.000.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)***</b>	<b>74,21 %</b>	<b>72,15</b>	<b>11.068.575.973</b>	<b>72,2</b>	<b>11.068.575.973</b>	<b>72,25</b>	<b>11.068.575.973</b>	<b>72,3</b>	<b>11.068.575.973</b>	<b>72,35</b>	<b>11.068.575.973</b>
	<b>2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi***</b>	<b>10,76 %</b>	10,50		10,3		10,1		10		10	
	<b>3. Persentase Kampung KB Mandiri</b>	<b>36,8 %</b>	39,1		40,1		41		41,9		42,6	
	<b>4. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern</b>	<b>84 %</b>	84,4		84,6		84,7		84,9		85,1	
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	68,5 %	70	1.633.642.000	70,05	1.633.642.000	70,05	1.633.642.000	70,10	1.633.642.000	70,10	1.633.642.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Jumlah kecamatan yang melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	21 kecamatan	21		21		21		21		21	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	5 Laporan	21	924.000.000	21	924.000.000	21	924.000.000	21	924.000.000	21	924.000.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 dokumen	3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 dokumen	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sesuai Kearifan Budaya Lokal											
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	25 organisasi	25	134.642.000	25	134.642.000	25	134.642.000	25	134.642.000	25	134.642.000
<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Jumlah tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB yang diberdayakan</b>	<b>422 orang</b>	<b>415</b>	<b>2.959.536.000</b>	<b>415</b>	<b>2.959.536.000</b>	<b>415</b>	<b>2.959.536.000</b>	<b>415</b>	<b>2.959.536.000</b>	<b>415</b>	<b>2.959.536.000</b>
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	372 orang	372	2.604.000.000	372	2.604.000.000	372	2.604.000.000	372	2.604.000.000	372	2.604.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	NA Laporan	1	355.536.000	1	355.536.000	1	355.536.000	1	355.536.000	1	355.536.000
<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB.</b>	<b>628.667 PUS</b>	<b>628.700</b>	<b>4.438.597.973</b>	<b>628.700</b>	<b>4.438.597.973</b>	<b>628.700</b>	<b>4.438.597.973</b>	<b>628.700</b>	<b>4.438.597.973</b>	<b>628.700</b>	<b>4.438.597.973</b>

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	62	46.998.000	67	46.998.000	68	46.998.000	70	46.998.000	70	46.998.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	221.233 orang	10.331	4.354.899.973	10.331	4.354.899.973	10.531	4.354.899.973	10.531	4.354.899.973	10.531	4.354.899.973
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4	36.700.000	5	36.700.000	5	36.700.000	5	36.700.000	5	36.700.000
<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>20</b>	<b>2.036.800.000</b>	<b>20</b>	<b>2.036.800.000</b>	<b>20</b>	<b>2.036.800.000</b>	<b>20</b>	<b>2.036.800.000</b>	<b>20</b>	<b>2.036.800.000</b>
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	372 kampung	372	548.800.000	372	548.800.000	372	548.800.000	372	548.800.000	372	548.800.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	NA unit	372	1.488.000.000	372	1.488.000.000	372	1.488.000.000	372	1.488.000.000	372	1.488.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga***</b>	<b>62 %</b>	<b>62,5</b>	<b>6.886.600.000</b>	<b>62,5</b>	<b>6.849.600.000</b>	<b>62,75</b>	<b>6.849.600.000</b>	<b>63</b>	<b>6.864.600.000</b>	<b>63</b>	<b>6.886.600.000</b>
	<b>Indeks Lansia Berdaya</b>	<b>58,9</b>	<b>59,8</b>		<b>60,2</b>		<b>60,6</b>		<b>61</b>		<b>61,4</b>	
	<b>Indeks Pengasuhan Remaja</b>	<b>87,1</b>	<b>88,8</b>		<b>89,6</b>		<b>90,3</b>		<b>91</b>		<b>91,6</b>	
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah desa yang menyelenggarakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>		<b>372</b>	<b>280.000.000</b>	<b>372</b>	<b>243.000.000</b>	<b>372</b>	<b>243.000.000</b>	<b>372</b>	<b>258.000.000</b>	<b>372</b>	<b>280.000.000</b>
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	5	137.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	115.000.000	5	137.000.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 unit	11	143.000.000	11	143.000.000	11	143.000.000	11	143.000.000	11	143.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	12 kali	12	6.606.600.000	12	6.606.600.000	12	6.606.600.000	12	6.606.600.000	12	6.606.600.000
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan	12	3.003.000.000	12	3.003.000.000	12	3.003.000.000	12	3.003.000.000	12	3.003.000.000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	12	3.603.600.000	12	3.603.600.000	12	3.603.600.000	12	3.603.600.000	12	3.603.600.000

#### **4.2. SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dinsos PPKB PPPA sebagai perangkat daerah yang membidangi 3 (tiga) urusan wajib yang meliputi urusan Sosial, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat memiliki posisi yang strategis dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Beberapa program yang menjadi tugas dan fungsi Dinsos PPKB PPPA masuk dalam daftar program prioritas pembangunan daerah yang dituangkan melalui 7 (tujuh) program unggulan **“Sapta Cipta”**.

Dukungan dalam prioritas pembangunan daerah tersebut dijalankan melalui beberapa Sub Kegiatan. Adapun uraian Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dijabarkan dalam Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Sapta Cipta ke-2 “Sehat Wargane” (Misi 1)</b>			
1.1	Dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui			
1.1.1	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<p><b>Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> </ul>	Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan.
			<p><b>Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas</li> </ul>	Pemberian edukasi gizi, pendampingan, dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
1.1.2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	<p><b>Kegiatan: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan: Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting</li> </ul>	Pendampingan dan pemantauan data Keluarga Berisiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari Bidan Desa/nakes, Kader KB, dan Kader PKK Desa.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			(Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - Sub Kegiatan: Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
<b>2</b>	<b>Sapta Cipta ke-3 "Makmur Rakyat" (Misi 3 dan 4)</b>			
2.1	Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu			
2.1.1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	<b>Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> - Sub Kegiatan: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis operator data kesejahteraan sosial tingkat desa (DTSEN).
2.1.2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	<b>Kegiatan: Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> - Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu - Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial - Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan	- Pemberian bansos alat bantu disabilitas. - Pemberian bansos terencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar. - Layanan sosial melalui Puskesmas SLRT.
			<b>Kegiatan: Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui UPTD Rumah Singgah.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan</li> <li>- Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang</li> <li>- Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan</li> </ul>	
2.1.3	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	<p><b>Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan</li> <li>- Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang</li> <li>- Sub Kegiatan: Pelayanan Dukungan Psikososial</li> <li>- Sub Kegiatan: Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan kebutuhan dasar korban bencana (sandang, pangan, dan <i>trauma healing</i>).</li> <li>- Penyediaan kebutuhan dasar korban bencana khusus untuk kelompok rentan (lansia, anak, perempuan).</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Sapta Cipta ke-6 "Gumregah Wargane" (Misi 3)</b>			
3.1	Pembangunan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan			
3.1.1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	<p><b>Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi kegiatan dan penguatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).</li> <li>- Fasilitasi kegiatan dan Penguatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Karang Taruna.</li> </ul>
3.2	Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
3.2.1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	<b>Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b> - Sub Kegiatan: Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
3.2.2	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	<b>Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b> - Sub Kegiatan: Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Penanganan perempuan korban kekerasan secara komprehensif
<b>4</b>	<b>Sapta Cipta ke-7 “Lestari Alame” (Misi 5)</b>			
4.1	Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana			
4.1.1	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> - Sub Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Penguatan Kapasitas Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana.

Sesuai dengan Tabel 4.4 tersebut, dalam rangka mendukung program unggulan “Sapta Cipta”, Dinsos PPKB PPPA mendukung pada 4 (empat) program unggulan, yaitu:

1. Sapta Cipta ke-2 “Sehat Wargane” (Misi 1)

Dalam Sapta Cipta ke-2, Dinsos PPKB PPPA melaksanakan 1 (satu) program prioritas, yaitu “Dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui” yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Program tersebut diimplementasikan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting melalui:

- a. Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan, dimana hal ini merupakan upaya pengaturan kelahiran dalam rangka pencegahan *stunting*.
- b. Pemberian edukasi gizi, pendampingan, dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), sebagai bagian dari upaya dukungan gizi baik kepada ibu hamil, ibu pasca salin, serta ibu menyusui, maupun masyarakat umum lainnya.
- c. Pendampingan dan pemantauan data Keluarga Berisiko *Stunting* oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang juga merupakan wujud nyata dukungan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* berbasis desa.

2. Sapta Cipta ke-3 “Makmur Rakyat” (Misi 3 dan 4)

Pada Sapta Cipta ke-3, Dinsos PPKB PPPA melaksanakan 1 (satu) program prioritas, yaitu “Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu”. Dalam program prioritas ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah melalui kegiatan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). VDK merupakan salah satu inovasi Bupati Magelang terpilih berupa kegiatan pendataan kemiskinan di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaharui dan melengkapi data profil masyarakat, khususnya rumah tangga miskin dan kelompok rentan, agar informasi yang tersedia benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini. Kegiatan Verifikasi Data Kemiskinan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh ASN secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab dalam memperkuat kualitas tata kelola data sehingga dapat diperoleh data yang valid untuk melakukan berbagai intervensi khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam program prioritas “Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu”, Dinsos PPKB PPPA melaksanakannya melalui Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Penanganan Bencana. Hal tersebut diimplementasikan melalui:

- a. Bimbingan teknis operator data kesejahteraan sosial tingkat desa (DTSEN), dimana hal ini merupakan wujud dukungan dalam pengentasan kemiskinan melalui penyediaan data yang valid serta penyediaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data dasar dalam pelaksanaan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK).
  - b. Pemberian bansos berupa alat bantu disabilitas, bansos terencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyelenggaraan layanan sosial melalui Puskesmas SLRT. Ketiga hal tersebut merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan.
  - c. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui UPTD Rumah Singgah. Hal ini juga merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan yang dilaksanakan melalui UPTD Rumah Singgah Dinsos PPKB PPPA.
  - d. Penyediaan kebutuhan dasar korban bencana (sandang, pangan, dan *trauma healing*) sekaligus penyediaan kebutuhan dasar korban bencana khusus untuk kelompok rentan (lansia, anak, perempuan), dimana hal ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu yang menyoar kelompok rentan miskin yaitu korban bencana.
3. Sapta Cipta ke-6 “Gumregah Wargane” (Misi 3)
- Pada Sapta Cipta ke-6, Dinsos PPKB PPPA melaksanakan 2 (dua) program prioritas, yaitu:
- a. Pembangunan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial. Hal ini diimplementasikan melalui fasilitasi kegiatan dan penguatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Karang Taruna.
  - b. Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah, yang dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Perempuan. Hal ini diimplementasikan melalui fasilitasi pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang mulai berproses pembentukannya pada tahun pertama RPJMD. Selain itu, dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan diselenggarakan pelayanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif.

#### 4. Sapta Cipta ke-7 “Lestari Alame” (Misi 5)

Pada Sapta Cipta ke-7, Dinsos PPKB PPPA melaksanakan 1 (satu) program prioritas, yaitu “Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana” yang dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana. Dalam implementasinya dilaksanakan melalui Penguatan Kapasitas Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

### **4.3. INDIKATOR KINERJA DINSOS PPKB PPPA**

Indikator kinerja dalam sebuah perangkat daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu organisasi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap perangkat daerah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, perangkat daerah dapat mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah ke depannya. Sehingga perangkat daerah dapat mencapai tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan tepat. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci atau IKK adalah indikator yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, Indikator Kinerja Kunci berfungsi untuk membantu mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai. IKK juga merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan digunakan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.

Dinsos PPKB PPPA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinsos PPKB PPPA dapat diuraikan secara rinci dalam Tabel 4.5 berikut

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penurunan PPKS	Persen	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,28	
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,95	93,19	93,42	93,65	93,89	94,12	
3	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64,58 – 64,60	65,33 – 65,37	66,08 – 66,15	66,83 – 66,92	67,58 – 67,69	68,33 – 68,46	
4	Cakupan Penanganan PPKS	Persen	48,81	49	49,2	49,4	49,6	49,6	
5	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,266 – 0,256	0,264 – 0,245	0,262 – 0,233	0,259 – 0,222	0,257 – 0,211	0,255 – 0,200	
6	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,57	63,76	63,94	64,12	64,31	64,5	
7	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73,3	73,5	73,7	73,9	74	74,2	

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten (Indikator SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	25,5	25,5	26	26,5	26,5	26,5	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	8,7	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	persen	72,1	72,15	72,2	72,25	72,3	72,35	
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	10,70	10,50	10,30	10,10	10,00	10,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jangka menengah periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinsos PPKB PPPA merupakan dokumen perencanaan yang dibentuk berdasarkan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan strategis dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinsos PPKB PPPA dalam pencapaian tujuan serta sebagai dasar pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

Dalam pelaksanaan Renstra, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah terkait prioritas dalam pencapaian seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2029 perlu adanya upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasil lebih efektif.

Dengan telah tersusunnya Renstra Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi seluruh perangkat organisasi serta jejaring dan mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pembangunan komitmen bersama sangat diperlukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan sasaran perangkat daerah pada akhirnya menjadi daya dukung dalam pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera.

Kota Mungkid, 19 September 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA  
KABUPATEN MAGELANG



BELA PINARSI, SH, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670120 198703 2 001